

e-ISSN: 2597-7423

p-ISSN: 2597-7431

**JURNAL**

# **TRIAS POLITIKA**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau Kepulauan

e-ISSN



p-ISSN



**UNRIKA**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN





# JURNAL TRIAS POLITIKA

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau Kepulauan Batam

e-ISSN: 2597-7423  
p-ISSN: 2597-7431

- Editorial Team
- Peer Review
- Focus & Scope
- Author Guideline
- Publication Ethic
- Author Fee
- Screening Plagiarism

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT  
 ARCHIVES ANNOUNCEMENTS EDITORIAL TEAM CONTACT E ISSN P  
 ISSN REVIEWER AUTHOR GUIDELINES FOCUS AND SCOPE PUBLICATION  
 ETHIC GOOGLE SCHOLAR GARUDA

Template:

TEMPLATE

Powered By:



OPEN JOURNAL SYSTEMS

USER

Username

Password

Remember me

Login

Indexed By:



EDITING TOOLS:



e-ISSN: 2597-7423

p-ISSN: 2597-7431

e-ISSN



9 772597 742228

p-ISSN



9 772597 743004

Home > Archives > Vol 3, No 2 (2019)

## Vol 3, No 2 (2019)

Oktober 2019, Jurnal Trias Politika

DOI: <http://dx.doi.org/10.33373/ftp.v3i2>

Jurnal Trias Politika adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik

### Table of Contents

#### Articles

<a href="#">ANALISIS KINERJA APARAT KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN BENGKONG LAUT KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM</a>	PDF 89 - 98
Indrawati Indrawati, Linayati Lestari	
<a href="#">IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2018</a>	PDF 99 - 117
Muhammad Solihin, Rahmayandi Mulda	
<a href="#">PERAN PEMERINTAH MELALUI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM MENYOSIALISASIKAN BAHAYA MERKURI BAGI KESEHATAN DI KECAMATAN BRANG REA</a>	PDF 118 - 138
Yusmawati Yusmawati, Restiawan Permana	
<a href="#">ANALISIS PENGARUH ETNISITAS DALAM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI: PASCA PILKADA 2017</a>	PDF 139 - 155
Makmun Wahid, Haryadi Haryadi	
<a href="#">TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN COMPACT DISK (CD) BAJAKAN DI KOTA BATAM</a>	PDF 156 - 169
Pristika Handayani	
<a href="#">MENGUNGKAP FENOMENA BAHASA CAMPURAN PADA BUDAYA POPULER DALAM PERSPEKTIF POSTMODERN</a>	PDF 170 - 181
Teguh Tri Susanto, Jaka Atmaja, Chepi Nurdiansyah, Nur Alam	

#### LANGUAGE

Select Language

English

Submit

#### JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

#### Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

#### FONT SIZE

#### INFORMATION

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

#### NOTIFICATIONS

- View
- Subscribe

Journal Help

View My Stats



View My Stats



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.



# JURNAL TRIAS POLITIKA

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau Kepulauan Batam

e-ISSN: 2597-7423  
p-ISSN: 2597-7431

- [Editorial Team](#)
- [Peer Review](#)
- [Focus & Scope](#)
- [Author Guideline](#)
- [Publication Ethic](#)
- [Author Fee](#)
- [Screening Plagiarism](#)

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT  
 ARCHIVES ANNOUNCEMENTS EDITORIAL TEAM CONTACT E ISSN P  
 ISSN REVIEWER AUTHOR GUIDELINES FOCUS AND SCOPE PUBLICATION  
 ETHIC GOOGLE SCHOLAR GARUDA

Template:

**TEMPLATE**

Powered By:



[OPEN JOURNAL SYSTEMS](#)

USER

Username

Password

Remember me

Indexed By:



EDITING TOOLS:



e-ISSN: 2597-7423

p-ISSN: 2597-7431

e-ISSN



9 772597 742229

p-ISSN



9 772597 743004

Home > About the Journal > **Editorial Team**

## Editorial Team

### Editors

Mrs. [Linayati Lestari](#), University of Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, Indonesia  
 Erwin Musdah, Indonesia  
 Retno Dewi Pramodia Ahsani, Universitas Tidar, Indonesia  
 Andy Arya Maulana Wijaya, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia  
 Yustinus Fandi Setyobudi, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia  
 Ms. [Nuhavati Nurhavati](#), Progrma Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan Batam, Indonesia

### Layout Editors

[Muhammad Solihin](#), Riau Kepulauan University

### LANGUAGE

Select Language

English

### JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

### Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

### FONT SIZE

### INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

### NOTIFICATIONS

- [View](#)
- [Subscribe](#)

[Journal Help](#)

[View My Stats](#)



[View My Stats](#)



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



**ANALISIS KINERJA APARAT KELURAHAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN  
BENGGONG LAUT KECAMATAN BENGGONG KOTA BATAM**

Indrawati<sup>1</sup>, Linayati Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan,  
Indonesia

*indrawati@gmail.com*

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan,  
Indonesia

*linayatilestari@yahoo.com*

**Abstrak**

*Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparat pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dalam bentuk skripsi diharapkan dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif untuk melihat bagaimana kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Adapun Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipatif (Participant Observation) melalui Wawancara dan responden melalui Kuesioner. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah melalui lima indikator atau variabel yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu Produktifitas kerja, Tanggung Jawab, Disiplin, Kemampuan Sumber Daya, dan Motivasi, yang sangat berpengaruh didalam kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut adalah variabel Kemampuan sumber daya manusia, karena dengan Kemampuan sumber daya manusia yang telah di miliki oleh aparat Kelurahan Bengkong Laut tersebut, maka penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut bisa berjalan dengan baik.*

*Kata Kunci: Kinerja, Aparat Kelurahan, Penyelenggara Pemerintahan*

**Abstract**

*Urban village headman is the work area as the district under district that is under and is responsible to camat. Kelurahan has the duty and function exercise powers delegated by the Head of government and other governments carry out tasks in accordance with applicable laws. The working relationship with administrative districts hierarchical. Establishment of village is aimed to improve the ability of governance villages fruitfully, effective and service to the public in accordance with the level of development and progress of the construction. The purpose of this study was to determine the extent to which the performance of government officials in the Village of Sea Bengkong Bengkong District of Batam. While the benefits of this research in the form of the thesis is expected to be used to qualify for a Bachelor's degree in Public Administration at the Faculty of Social and Political Science Public Administration Program, University of Riau Islands. In this study, the authors used qualitative*



*descriptive method to see how the performance of government officials to the village of governance in Sub Sea Bengkong Bengkong District of Batam. The research was conducted in the village Bengkong Bengkong districts northwest of Batam, data collection techniques used in this study is a Participant Observation (Participant Observatioan) through interviews and response through kuesioner. The results obtained in this study is five indicators or variables that I use in this study, namely productivity of labor, Responsibility, Discipline, Capability Human Resources, and Motivation, which is very influential in the performance of government officials Village on governance in Sub Bengkong Sea Subdistrict Bengkong Batam City is variable ability of human resources, due to the ability of human resources has been owned by the sea Bengkong village officials, the administration of the wheels of government in the village Bengkong sea can run well.*

*Keywords : Performance, Village Apparatus, Governance Village.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu: *pertama*, prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; *kedua*, Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; *ketiga*, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya; *keempat*, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Kebijakan otonomi daerah dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab kepada daerahnya, sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Seiring diimplementasikan Undang-undang nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam. Untuk itu dalam struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan

Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam dinyatakan bahwa semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan.

Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Efisiensi dalam memberikan pelayanan selain disebabkan oleh jumlah aparat yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, juga disebabkan oleh banyaknya jenis pelayanan yang diberikan kelurahan kepada masyarakat. Kinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia bekerja. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja (*performance*) merupakan tingkat pencapaian hasil atau *the degrees of accomplishment*.



Tabel 1 Prestasi Kelurahan Bengkong Laut (2011-2014)

Tahun	Prestasi
2011	Juara Harapan 1 Perpustakaan terbaik desa/kelurahan Propinsi Kepulauan Riau 2011
2012	Juara 3 Lomba Kelurahan tingkat kota Batam 2012
2013	Juara 3 Lomba Kelurahan tingkat kota Batam 2013
2014	Juara Umum MTQ tingkat Kecamatan Bengkong 2014

Sumber: Kantor Kelurahan Bengkong Laut

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan.

Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Adapun yang berpengaruh dengan permasalahan tersebut adalah dalam hal pemberian kesempatan meningkatkan kemampuan dan pemberian wewenang secara proporsional sehingga dapat menentukan baik-buruknya kinerja pemerintah kelurahan. Karena itu, kinerja aparat membutuhkan kemampuan dan motivasi baik dalam pencapaian hasil pelaksanaan tugas maupun dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

### Kinerja, Aparat Kelurahan, dan Penyelenggara Pemerintahan

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Jika pegawai tidak melakukan pekerjaannya, maka suatu organisasi akan mengalami kegagalan. Aparat kelurahan adalah orang atau pegawai yang bertugas menjaga kelancaran administrasi dan pelayanan di kantor lurah; sementara Penyelenggaraan pemerintahan meliputi, tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan kinerja, pihak pemerintah kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *good governance* di Kelurahan Bengkong Laut. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan aparat kelurahan kepada masyarakat antara lain dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini:

Tabel 2 Jenis-Jenis Pelayanan yang Diberikan Kelurahan kepada Masyarakat

No	Jenis Pelayanan
1.	Pelayanan Pembuatan KTP dan KK
2.	Pengantar Pembuatan Surat Keterangan
3.	Pengantar Pembuatan SKCK
4.	Kependudukan (Nikah, Cerai, Lahir, Mati)

Sumber: Kantor Kelurahan Bengkong Laut

### METODELOGI

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan suatu gejala yang ada pada waktu penelitian dengan jalan mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian secara sistematis dan analisa sesuai dengan teori yang ada.



### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Lurah Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2014-2015 beralamat Jl. Bengkong Laut No 01 Kode Pos 29457.

### **Sumber Data**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: a). Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (wawancara) dan responden melalui kuesioner; dan b). Data Sekunder, yakni data yang diperoleh diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

### **Populasi dan Sampel**

Pada penelitian ini yang disebut populasi adalah Staf Bengkong Laut, Rukun Warga yang berjumlah 11 RW, Rukun Tetangga yang berjumlah 49 RT, dan Penduduk Bengkong Laut yang berjumlah lebih kurang 14.315 jiwa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *purposive random sampling*. *Purposive random sampling* adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini dari populasi yang berjumlah 14.315 jiwa, sampel yang digunakan sebanyak 33 jiwa. Dengan sampel sejumlah itu diharapkan sudah memenuhi persyaratan dalam pengambilan sampel

### **PEMBAHASAN**

Dari hasil kuesioner penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan tiga indikator penelitian yaitu Produktivitas kerja, Tanggung Jawab, Disiplin,. Dari ketiga indikator tersebut penulis menganalisa hasil penelitian tersebut yang penulis simpulkan melalui rekapitulasi tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Rekapitulasi kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam

No.	Indikator	Tanggapan Responden	Persentase
1	Sikap Aparatur	Ramah	30,30
		Cukup ramah	57,57
		Kurang ramah	15,16
2	Kemampuan	Cepat	51,51
		Cukup cepat	36,36
		Kurang cepat	12,13
3	Penyelenggaraan	Sangat baik	51,51
		Baik	36,36
		Tidak baik	12,13
4	Tanggung jawab	Sangat bertanggung jawab	51,51
		Bertanggung jawab	33,34
		Tidak bertanggung jawab	15,15
5	Kedisiplinan	Sangat disiplin	15,15
		Disiplin	48,49
		Tidak disiplin	36,36
6	Hadir secara rutin	Sudah sangat rutin	18,18
		Rutin	45,46
		Tidak hadir secara rutin	36,36
7	Hadir tepat waktu	Sangat tepat waktu	9,09
		Tepat waktu	39,40
		Tidak tepat waktu	51,51
8	Kinerja	Sudah optimal	48,48
		Optimal	33,33
		Tidak optimal	18,19

Sumber: Diolah Peneliti

Mengenai analisis kinerja aparat Kelurahan Bengkong Laut di dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang diukur melalui hasil kerja aparat Kelurahan Bengkong Laut tersebut. Penulis menganalisa penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam kepada Lurah Bengkong Laut yaitu Bapak Wendhy S. Pratama, S.STP sebagai berikut:

*"Mengenai kinerja aparat kelurahan itu memiliki perilaku yang beragam, tergantung dari tanggung jawab dari masing-masing individu. Sebenarnya dari kinerjanya sudah baik, namun harus bisa lebih di optimalkan lagi. Semua itu kembali ke individu masing-masing<sup>56</sup>".*



Dari hasil wawancara tersebut penulis bisa menganalisa bahwa kinerja aparat Kelurahan Bengkong Laut dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sudah dikatakan baik, namun harus bisa lebih ditingkatkan lagi untuk memperoleh hasil yang optimal. Namun semua itu kembali pada tanggung jawab dari masing-masing individu aparat kelurahan yang memiliki perilaku dan sikap yang beragam.

## KESIMPULAN

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan penulis dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Produktifitas Kerja, produktivitas kerja aparat Kelurahan Bengkong Laut sudah optimal, namun perlu lebih di tekankan lagi ke arah kemampuan, pengetahuan, kualitas sumber daya manusianya dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut; *Kedua*, Tanggung Jawab, tanggung jawab sangat penting di dalam mewujudkan kinerja yang baik, khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong.

*Ketiga*, Disiplin, masih terdapatnya pelanggaran yang mengenai kedisiplinan waktu kerja di Kelurahan Bengkong Laut. Hal ini memicu pada pola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik. Namun untuk kedepannya akan di terapkan sistem absen sidik jari yang akan memudahkan pengontrolan disiplin waktu oleh atasan langsung; *Keempat*, Kemampuan Sumber Daya, bahwa penempatan sumber daya di Kelurahan Bengkong Laut sudah tepat dan sesuai dengan kemampuan yang di miliki dari masing-masing aparat kelurahan, namun semua kembali pada tugas dan tanggung jawab dari masing-masing individu sesuai dengan standar operasional yang telah berlaku. Bisa juga di katakan walaupun standar operasional prosedur sudah jelas dan telah di transformasikan

dengan tepat, namun pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, yang memiliki keterampilan, serta mengetahui tugas pokok dan fungsinya.

*Kelima*, Motivasi, motivasi sangat berpengaruh besar didalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut. Motivasi yang dimaksud terletak pada segi peningkatan kesejahteraan aparat, misalnya melalui tunjangan gaji yang di nilai dari pencapaian kinerja aparat, itu sangat menjadi faktor yang paling berpengaruh didalam keberhasilan penyelenggaraan roda pemerintahan di kelurahan bengkong laut. Selain itu motivasi eksternal juga menjadi kekuatan yang ada di dalam individu yang dipengaruhi oleh faktor internal yang dikendalikan oleh pimpinan, yaitu meliputi penghargaan, kenaikan pangkat dan tanggung jawab. Motivasi eksternal meliputi faktor pengendalian oleh pimpinan kelurahan yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan seperti halnya gaji atau upah, keadaan kerja dan kebijaksanaan kelurahan dan pekerjaan yang mengandung hal-hal seperti penghargaan, pengembangan dan tanggung jawab. Lurah yang sebagai perlu mengenai motivasi eksternal untuk mendapatkan tanggapan yang positif dari aparat kelurahan. Tanggapan yang positif ini menunjukkan bahwa bawahan sedang bekerja demi keberhasilan penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut. Pimpinan kelurahan dapat menggunakan motivasi eksternal yang positif maupun negatif. Motivasi positif merupakan penghargaan atas prestasi yang sesuai, sedangkan motivasi negatif mengenakan sanksi jika prestasi tidak dapat dicapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azwar, Saifuddin. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Hasibuan, Malayu S.P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- John M. Ivancevich. (2002). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Bandung: Erlangga
- Kartini Kartono. (2000). *Pengantar Metodologi*. Bandung: Research Sosial Alumni
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE



- Moeheriono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Keban, Yeremias. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Rawirosentono. (1999). *Bahasa Komprehensif Strategi Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sedarmayanti. (2011). *Membangun dan Mengembang Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan*. Bandung: Refika Aditama
- Sobandi. (2006). *Organisasi menurut Input, Output, Outcome, Benefit*. Yogyakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Kepu Cipta
- Syuhandhak, Mokhammad. (1994). *Administrasi Kepagawaian Negara,Teori dan Praktek Penyelenggaraannya di Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Widodo, Joko. (2005). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang: Bayumedia Publishing
- Undang – Undang Dasar1945 dan Perubahannya, Jakarta: Puspaswara. 2008
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 pasal 1 butir n, *Tentang Otonomi Daerah*
- Peraturan Walikota Batam No 29-I Tahun 2010 *tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam*
- Profil Kota Batam Tahun 2014
- Profil Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2014
- Profil Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam Tahun 2014